
TRACKING THE SPIRIT OF ISLAMIC ANTI-NEOIMPERIALISM IN THE THOUGHTS OF AYATOLLAH ALI KHAMENEI

DINA YULIANTI

Faculty of Social and Political Sciences Universitas Padjadjaran
dina.yulianti@unpad.ac.id

Abstract

In the 20th century, colonized nations achieved their independence. Nevertheless, the struggle against colonization continues as imperialistic forces have transformed into neoimperialistic powers, maintaining control over economic, political, and cultural aspects. Consequently, the struggles of Third World countries have evolved from physical resistance against colonization to the pursuit of establishing an independent, just governance system that upholds the rights of marginalized populations. This article explores the concept of 'neoimperialism' and how the Qur'an views resistance against this neoimperialism, particularly through an examination of the thoughts of the eminent Iranian scholar, Ayatollah Ali Khamenei. One of the key points in Ayatollah Khamenei's thinking is that neoimperialistic powers exploit native elite groups in their quest for dominance and employ neoimperialistic jargon such as modernity, progress, human rights, and democracy. Islam does not inherently oppose these concepts but rather opposes their misuse for the benefit of neoimperialism.

Keywords: *Neoimperialism, Anti-Neoimperialism, Democracy, Modernity, Human Right.*

Abstrak

Di abad ke-20, negara-negara terjajah telah meraih kemerdekaannya. Namun demikian, perjuangan melawan penjajahan masih berlanjut karena kekuatan imperialis telah bertransformasi menjadi kekuatan neoimperialisme dalam melanjutkan penguasaan ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, perjuangan negara-negara Dunia Ketiga pun bertransformasi dari perjuangan melawan penjajahan fisik menjadi perjuangan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mandiri, adil, dan menegakkan hak-hak kaum marginal. Artikel ini membahas konsep “neoimperialism” dan bagaimana al-Qur’an memandang perlawanan terhadap neoimperialisme ini, khususnya melalui penggalian terhadap pemikiran ulama besar Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Di antara poin penting pemikiran Ayatullah Khamenei adalah bahwa kekuatan neoimperialisme memanfaatkan kelompok elit pribumi dalam upaya penguasaannya dan menggunakan jargon-jargon neoimperialis, yaitu modernitas, kemajuan, HAM, dan demokrasi. Islam sama sekali tidak menentang keempat konsep tersebut, namun menentang penyalahgunaan konsep-konsep itu untuk kepentingan neoimperialisme.

Kata Kunci: *Neoimperialisme, Anti-Neoimperialisme, Demokrasi, Modernitas, Hak Asasi Manusia.*

INTRODUCTION

Sejarah negara-negara muslim di dunia dipenuhi dengan kisah perjuangan melawan penjajah. Banyak di antara perjuangan itu yang dipimpin oleh ulama atau pemimpin muslim. Di India, kita mengenal nama Maulvi Liaquat Ali (1817-1892), seorang ulama dari Allahabad yang memimpin pemberontakan Perang Kemerdekaan India Pertama, atau “pemberontakan” tahun 1857 melawan Inggris. Di India, umat Islam menjadi korban utama penjajahan Inggris karena dianggap sebagai pelaku pemberontakan (Irshad 2020). Di Aljazair, antara lain ada nama Abdul Qadir bin Muhiddin yang berjuang melawan penjajahan Prancis pada awal abad ke-19. Di Indonesia, sejak tahun 1926, ulama-ulama Islam telah membentuk Nahdlatul

Ulama yang menginspirasi perjuangan rakyat untuk melawan Belanda. Bahkan pada tahun 1945, NU mengeluarkan “Resolusi Jihad” untuk melawan Sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Menurut ulama NU:

“Jihad yang dilakukan oleh ulama dan santrinya ialah jihad membela tanah air, sebagai bentuk cinta tanah air (*ḥubb al-waṭan*) yang dimaknai sebagai *jihād fī sabilillāh*. Karena upaya mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia dalam pandangan hukum Islam merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dijalankan umat Islam” (Farih 2016).

Di masa pascapenjajahan, yaitu ketika secara *de jure* negara-negara terjajah meraih kemerdekaan pasca-Perang Dunia II, perjuangan melawan penjajahan masih berlanjut. Perjuangan itu berubah bentuk menjadi perjuangan membebaskan orang-orang yang ditindas atau didominasi oleh imperialisme global, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya kapitalisme dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang mandiri, adil, dan menegakkan hak-hak kaum marginal (Bayat 2008).

Imperialisme yang terus dilakukan oleh kekuatan kapitalisme global diistilahkan sebagai “imperialisme baru” atau “neoimperialisme.” Keberadaan neoimperialisme ini berkali-kali dikemukakan oleh para pemikir, antara lain Presiden Sukarno, yang pernah mengemukakan konsep ‘Nekolim’ (neokapitalisme dan neoimperialisme). Melalui konsep ini, Presiden Sukarno mengingatkan bangsa Indonesia bahwa para penjajah masih terus berusaha melanjutkan penguasaan dan eksploitasi atas suatu bangsa. Presiden Sukarno menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar perubahan kepemimpinan di sebuah negara, dari pemerintahan penjajah menjadi pemerintahan yang dikelola oleh anak bangsa. Namun, kemerdekaan yang ideal adalah ketika keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dapat dicapai (Sapanti 2018).

Pemimpin Spiritual Iran, Ayatullah Khamenei, dalam salah satu pidatonya juga menggunakan istilah *este'mar-e jadīd* (imperialisme baru) sebagai transformasi dari imperialisme klasik atau *este'mar-e mostaqim* (imperialisme langsung). Metode yang dipakai oleh neoimperialisme ini, menurut Ayatullah Khamenei, adalah dengan menempatkan agen-agen Barat di sebuah negara, dan bahkan agen tersebut dijadikan kepala negara. Kepala negara utusan Barat inilah yang bertugas mengamankan kepentingan kekuatan neoimperialis (Khamenei 2013).

Artikel ini akan membahas konsep “neoimperialism” dan bagaimana al-Qur'an memandang perlawanan terhadap neoimperialisme ini, khususnya melalui penggalian terhadap pemikiran ulama besar Iran, Ayatullah Khamenei.

RESULTS AND DISCUSSION

Imperialisme dalam Al-Qur'an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imperialisme diartikan sebagai sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Dalam Bahasa Arab dan Persia, kata yang digunakan untuk istilah penjajahan adalah *este'mar*. Kata ini juga digunakan dalam al-Qur'an, namun dalam konteks positif, sebagaimana dapat kita cermati dalam surah Hūd ayat 61 berikut ini.

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Saleh berkata, ‘Hai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Dalam ayat ini, kata *ustu'mira* bermakna ‘pemakmur’ atau yang memakmurkan, yang menyejahterakan. Dalam tafsir terhadap ayat

ini yang disampaikan oleh Ayatullah Makarem Shirazi disebutkan bahwa Nabi Saleh menyeru kaum Samud agar menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Nabi Saleh mengingatkan bahwa Allah-lah pencipta manusia; Allah menciptakan manusia dari tanah; dan Allah memercayakan pengelolaan populasi bumi dan sumber daya alam yang ada di bumi kepada manusia.

Menurut Ayatullah Shirazi, kata *ista'mara* dalam ayat ini mengandung makna “pembangunan dan penyelesaian, pendelegasian wewenang, serta penyediaan sarana dan fasilitas untuk pembangunan.” Namun, makna asal ini telah terdistorsi sehingga di masa modern ini, kata *isti'mar* bermakna penguasaan atas manusia dan bumi dengan tujuan memperkaya satu kelompok yang kuat (para penjajah). Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa kata *isti'mar* yang memiliki berbagai wajah yang tidak menyenangkan, terkadang memanifestasikan dirinya dalam bentuk budaya, intelektual, ekonomi, politik, dan militer, adalah salah satu yang telah menggelapkan wajah dunia kita saat ini, ketika kelompok minoritas di dunia ini memiliki segalanya dan sangat besar. Mayoritas populasi di bumi kekurangan segalanya, hingga akhirnya, penjajahan menjadi sumber perang. Mereka memunculkan kehancuran dan kejahatan serta melakukan perlombaan senjata yang menghancurkan” (<https://www.makarem.ir>).

Menurut Ayatullah Makarim Shirazi, kata yang digunakan al-Qur'an untuk perilaku imperialis ini adalah *istidh'af*, yang berarti melemahkan. Dalam arti kata yang luas, *istidh'af* berarti melemahkan pemikiran, politik, ekonomi, dan lain-lain. Sementara itu, korban dari perilaku *istidh'af* disebut *mustadh'afin* (kaum tertindas). Mengenai *mustadh'afin*, Ayatullah Khamenei dalam salah satu pidatonya mengatakan,

“Ketika kita berbicara tentang perlawanan terhadap kaum imperialis dunia dengan segala perilaku eksploitatif dan arogansinya, kita sebenarnya sedang berbicara kepada orang-

orang tertindas di seluruh dunia. Ini adalah pesan alamiah dari revolusi kita. Musuh-musuh kita juga tahu persis bahwa inilah sebenarnya yang sedang kita perjuangkan. Permusuhan mereka kepada kita, juga permusuhan mereka kepada Imam Khomeini, serta Revolusi Islam Iran, didasarkan kepada isu pembelaan kita kepada kaum tertindas tersebut” (<https://farsi.khamenei.ir>).

Jika *ista'mar* dalam surah Hūd ayat 61 bermakna memakmurkan bumi, maka perilaku sebaliknya, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi, amat dikecam dalam al-Qur'an. Salah satu kecaman al-Qur'an terhadap pelaku kerusakan di muka bumi terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 205:

“Setiap kali dia memperoleh kekuasaan, dia berkeliling bumi menyebarkan kerusakan dan menysia-nyiaikan tanaman dan kehidupan manusia, padahal Allah (yang kesaksiannya dia serukan) tidak menyukai kerusakan.”

Penysia-nyiaan tanaman dan kehidupan manusia dalam konteks kekuatan neoimperialisme tampaknya sangat jelas dalam dinamika dunia saat ini. Sejak era 1970-an, kelompok manusia yang mendominasi dalam hal kekayaan dan kekuasaan, terutama berasal dari Amerika Serikat, telah mengembangkan sistem pertanian yang dikenal sebagai “pertanian industri”. Dalam sistem ini, kegiatan pertanian sangat bergantung pada produk-produk industri seperti pupuk kimia, pestisida kimia, dan benih yang diproduksi oleh perusahaan besar, bukan melalui pemuliaan lokal oleh para petani. Sistem pertanian industri dipaksakan oleh negara-negara neoimperialis kepada negara-negara miskin dan berkembang. Dalam jangka panjang, yang terjadi adalah penurunan produksi akibat penurunan kualitas tanah yang terus-menerus diberi input kimia; ketergantungan impor pupuk, pestisida, dan benih; keterjebakan pada utang jangka panjang yang dulu digunakan untuk membangun sistem pertanian industri yang padat modal; serta kerusakan ekosistem. Pakar agroekologi, Vandana Shiva menulis:

Selama revolusi pertanian industri, sistem pengetahuan tradisional telah digantikan oleh cara berpikir militeristik yang mempromosikan kekerasan terhadap bumi. ...Pertanian industri bukanlah suatu sistem pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman tentang proses-proses ekologis dalam suatu agroekosistem; sebaliknya, pertanian industri adalah kumpulan alat kekerasan. Alat-alat itu secara harfiah adalah produk industri perang dan mengandalkan bahan kimia pertanian yang awalnya dirancang untuk membunuh orang (Shiva 2016).

Neoimperialisme dan Manifestasinya di Dunia Modern

Berbeda dengan imperialisme klasik yang ditandai dengan penaklukan dan kekuasaan, neoimperialisme adalah dominasi dan hegemoni suatu negara atas negara lain, terutama melalui kesepakatan hukum formal, kekuatan ekonomi, dan pengaruh budaya (<https://www.encyclopedia.com>).

Yu (2020) berpendapat bahwa tahap neoimperialisme muncul pada tahun 1970-an dengan karakteristik utama adanya ekspor uang kertas. Sebelumnya, pasca-Perang Dunia II, negara-negara pemenang perang, dipimpin AS, membuat sistem keuangan dunia yang disebut Bretton Woods di mana uang Dollar yang dicetak di kertas menjadi mata uang standar dunia. Awalnya, setiap nominal yang dicetak di uang kertas di-*back up* oleh emas. Namun kemudian, sistem *back up* emas ini dihapus dan AS mencetak Dollar tanpa *back up* apa pun. Menurut Yu, dalam sistem seperti ini, uang pada dasarnya sama dengan “dokumen yang ditandatangani mengakui utang.”

Namun di tahun 1960-an, Presiden Indonesia, Sukarno, telah mengemukakan istilah ‘NEKOLIM’ (neokapitalisme dan neoimperialisme). Sukarno memandang “Barat” sebagai representasi NEKOLIM. Negara-negara Barat yang semula imperialis, kini melanjutkan imperialismenya di era baru, sehingga disebut ‘neoimperialisme.’ Dalam pidatonya di Kairo pada 6 Oktober 1964, di depan Konferensi ke-2 Gerakan Non-Blok (GNB), Sukarno mengatakan:

Bagaimana mungkin sebuah negara hidup berdampingan dalam damai saat pangkalan-pangkalan militer dan benteng-benteng ekonomi di sekelilingnya digunakan untuk menumbangkan atau memanipulasi aktivitas domestik negara itu? Bagaimana bisa sebuah negara dapat hidup berdampingan dalam damai ketika kekuatan asing mendominasi kebijakannya? Bagaimana bisa sebuah negara bertetangga dalam damai dengan negara-negara yang mencegah penegakan sistem sosial dan ekonomi yang sesuai dengan identitas nasional negara itu sendiri?" (Rundjan 2017).

Ayatullah Ali Khamenei memiliki pandangan yang sama. Ia mengatakan bahwa dalam satu atau dua abad terakhir, dunia dilanda bencana besar dengan munculnya fenomena kolonialisme dan imperialisme internasional yang memalukan dan menciptakan bencana besar. Hal terpenting dalam bencana besar ini adalah adanya sistem dominasi. Sistem dominasi yang dimaksud Ayatullah Khamenei adalah sistem internasional yang unipolar, di mana AS dan negara-negara kuat Eropa (atau sering disebut "Barat") telah menjadi "penguasa" dunia. Mereka memiliki kekuatan uang dan kekuasaan untuk memaksakan kemauan mereka terhadap negara-negara miskin dan berkembang yang merupakan bekas jajahan mereka. Sistem dominasi ini melanggar imperialisme namun dengan cara yang "modern," misalnya melalui perjanjian utang atau perjanjian dagang. Contoh dari perjanjian utang yang melanggar imperialisme adalah kewajiban negara-negara penerima utang dari Barat untuk melakukan privatisasi, pencabutan subsidi, dan membuka pasarnya bagi produk-produk impor. Dengan privatisasi, banyak perusahaan yang semula merupakan milik negara dijadikan perusahaan privat yang sahamnya diperjualbelikan. Dengan dibukanya keran impor, Barat berkesempatan membanjiri pasar negara-negara berkembang.

Lalu, mengapa banyak pemimpin negara-negara miskin dan berkembang bersedia untuk mengikat diri pada perjanjian dagang dan

perjanjian utang yang merugikan bangsanya dalam jangka panjang? Hal ini dijelaskan Ayatullah Khamenei dalam salah satu pidatonya, yaitu bahwa neoimperialisme melakukan penjajahan secara tidak langsung, melainkan melalui “agen” atau perpanjangan tangan imperialis. Orang-orang pribumi yang menjadi agen neoimperialis akan melakukan apa pun yang dikehendaki oleh Barat, meskipun merugikan bangsa mereka sendiri. Rakyat di negara tersebut sudah pasti akan memprotes perilaku pemerintah yang tunduk pada pihak luar dan menyengsarakan rakyat. Dalam kondisi ini, rakyat pasti akan memberontak dan untuk mencegah pemberontakan itu, rezim-rezim boneka di berbagai negara memerintah dengan cara tirani (Khamenei 2013).

Dalam neoimperialisme, ketundukan dan kepatuhan negara-negara miskin dan berkembang diraih melalui pencitraan tentang modernitas dan kemajuan. Barat dimunculkan sebagai simbol kemajuan dan bangsa-bangsa non-Barat didorong untuk meniru Barat, meskipun dengan mengorbankan banyak hal. Contoh yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu perubahan sistem pertanian, negara-negara didorong untuk beralih dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian industri yang modern. Karena sistem pertanian modern (dengan benih “unggul” buatan pabrik) membutuhkan sangat banyak air, dibangunlah bendungan-bendungan raksasa dengan biaya utang. Pemupukan dan pembasmian hama dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang distribusi penjualannya dikuasai segelintir perusahaan transnasional. Bahan-bahan “modern” ini, selain mengakibatkan kerusakan tanah, juga merusak kesehatan manusia dalam jangka panjang.

Ayatullah Khamenei menyatakan bahwa “perkembangan” dan “kemajuan” merupakan dua jargon yang digunakan oleh kekuatan neoimperialis. Model pembangunan yang dipaksakan kepada negara-negara miskin dan berkembang adalah model Barat, dengan mengedepankan konsep modernitas, perkembangan, dan kemajuan. Seolah, “Bila ingin maju, tirulah Barat!” Padahal, Barat

mencapai kemajuan mereka hari ini adalah dari hasil penindasan dan penjajahan.

“Jika Inggris tidak menjajah India, Burma, dan wilayah Asia yang kaya itu, tidak merebutnya, tidak meningkatkan kekayaannya—yang digambarkan dengan sangat baik oleh orang India sendiri dalam catatan sejarah—mereka pasti tidak akan sampai di sini. Mereka mengisap dari orang lain seperti lintah dan menggemukkan diri sendiri” (Khamenei 2013).

Dalam salah satu pidatonya di depan para mahasiswa Universitas Ferdowsi di kota Masyhad tahun 2018, Ayatullah Khamenei mengatakan bahwa umat manusia memang seharusnya bergerak untuk maju, untuk melakukan transformasi, yaitu bergerak ke arah kemajuan dan perkembangan. Namun, apa yang dijadikan model bagi kemajuan itu? Setiap bangsa memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri jenis pembangunan yang paling tepat untuk bangsa itu. Wacana dan diskusi mengenai jenis pembangunan yang paling tepat seharusnya dibuka dan setiap bangsa diberi kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya (Khamenei, 2018). Dengan kata lain, pemaksaan ide-ide Barat kepada negara-negara non-Barat bukanlah hal yang benar.

Selanjutnya, Ayatullah Khamenei mengatakan bahwa selalu ada dua kesalahpahaman tentang kemajuan dan transformasi yang mengarah pada kemajuan. Salah satu kecenderungannya adalah pengkhianatan yang dilakukan atas nama kemajuan dan transformasi. Ayatullah Khamenei mencontohkan bagaimana Reza Khan datang dengan slogan kemajuan dan reformasi. Ia melakukan kudeta, tapi kemudian melakukan kediktatoran yang semuanya terjadi di bawah slogan ‘kemajuan’ dan ‘pembangunan.’ Putranya, Mohammad Reza, juga mengaku sebagai reformis, tapi ia juga kemudian menciptakan semua bencana ini bagi bangsa Iran.

Menurut Ayatullah Khamenei, fenomena ini juga terjadi secara global. Penjajahan atas bangsa-bangsa—yang merupakan aib sejarah umat manusia dalam dua abad terakhir—dilakukan atas nama

kemajuan bangsa. Penjajahan seolah berarti modernisasi. Inggris, Belanda, Portugis, dan Prancis pergi ke berbagai bagian Asia, Afrika, dan Amerika Latin, membantai penduduk asli, merebut tanah, mencuri, mengkhianati, dan menyebabkan ribuan bencana. Semua dilakukan atas nama modernisasi dan kemajuan.

Pada periode selanjutnya, ketika neoimperialisme muncul, hal yang sama terjadi lagi. Semua jenis agresi, provokasi perang, dan kudeta yang dilakukan oleh agen intelijen Barat semuanya dilakukan di bawah slogan modernisasi, kemajuan, dan pembangunan.

Ayatullah Khamenei menjadikan Afghanistan dan Irak sebagai contoh nyata. AS datang dan memasuki Irak untuk menciptakan ‘dunia baru’, untuk menciptakan dunia kebebasan, demokrasi, dan pembangunan bagi rakyat Irak. Faktanya, Irak hancur lebur. Bahkan, penderitaan yang dihadapi rakyat Irak di bawah pemerintahan sebelumnya—termasuk Saddam—masih belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan mereka di bawah pendudukan Amerika.

Jadi, menurut Ayatullah Khamenei, di satu sisi, jargon pembangunan telah disalahgunakan sepanjang sejarah dan di zaman modern ini. Itu terjadi di Iran dan berbagai belahan dunia lainnya. Sayangnya, di saat yang sama, memang bermunculan kaum puritan yang menentang segala jenis inovasi dan transformasi, padahal inovasi adalah tradisi sejarah; tradisi yang merupakan fitrah manusia karena tanpa inovasi, kehidupan manusia tidak ada artinya.

Ayatullah Khamenei juga menyatakan bahwa kita harus mendefinisikan kemajuan dan transformasi; dan apa yang kita inginkan darinya. Kita harus memahami apa yang kita cari, sehingga penyalahgunaan atas konsep kemajuan maupun penentangan terhadap kemajuan tidak perlu terjadi terjadi.

Pandangan Ayatullah Khamenei ini sejalan dengan kritik yang dikemukakan sebagian pemikir atas mazhab developmentalisme Barat. Barat telah mendoktrinkan paradigma pembangunan yang menjadikan Barat sebagai model, dilandasi oleh nilai liberalisme, dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Dalam paradigma ini,

pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai cara satu-satunya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Atas alasan itu, negara-negara Dunia Ketiga didorong untuk melakukan industrialisasi, di mana sebagian modalnya didapat dari negara-negara maju; atau berupa dana utang. Jumlah produksi digenjut dan diarahkan untuk ekspor ke Barat.

Kritik terhadap model pembangunan seperti ini, antara lain dikemukakan Fakih (2009). Pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi telah terbukti memunculkan ketimpangan ekonomi yang besar dalam masyarakat dan peningkatan pengangguran. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi terbukti tidak mendorong penyerapan tenaga kerja secara masif. Selain itu, proses industrialisasi dan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi telah membuat banyak pihak untuk mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan, sebagaimana yang telah dibahas tentang pertanian industri. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia, maupun bangsa-bangsa lain di dunia, memiliki kearifan lokal dalam bertani. Pertanian tradisional sangat mungkin tidak menghasilkan produksi pertanian sebanyak pertanian modern, tetapi dalam jangka panjang, tanah, air, dan alam tetap terjaga keselamatannya. Dalam paradigma pertumbuhan ekonomi, aspek kerusakan alam diabaikan. Sektor pertanian didorong agar menghasilkan produk sebanyak mungkin, sekalipun dengan merusak alam, dan terbukti, akhirnya, produksi menurun setelah terjadi penurunan kualitas tanah. Pada akhirnya, pihak yang meraup keuntungan adalah industri pertanian Barat.

Mansour Fakih mengemukakan teori sosial emansipatoris dalam merespon fenomena ini di mana seharusnya dilakukan penyadaran kritis masyarakat terhadap sistem yang tidak adil ini; dan juga ketimpangan sosial yang merupakan dampak dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ini. Pembangunan seharusnya tidak dilakukan dengan kaca mata “objektivitas” (yang didengungkan Barat), melainkan melakukan pemihakan pada nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan ekonomi dan politik kalangan yang marjinal (Fakih 2009).

Neoimperialisme dan Ekspor Demokrasi

Selain mendorong dan memaksa negara-negara untuk melakukan pembangunan yang “modern”, (contoh kasus: pertanian modern sebagaimana telah dijelaskan), Barat juga melakukan pemaksaan sistem demokrasi ala mereka kepada negara-negara Dunia Ketiga. Ayatullah Khamenei mengkritisi hal ini dengan mengatakan bahwa dalam sejarah, Barat tidak akan bisa menghilangkan stigma penjajahan dari wajah mereka. Slogan-slogan mereka tentang hak asasi manusia dan demokrasi tidak akan bisa menghapus tindakan arogan mereka di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan di banyak negara lain yang berada di bawah penjajahan Barat selama bertahun-tahun. Barat dulu melakukan penjajahan, hari ini, dengan cara yang berbeda, mereka sedang mengejar tujuan yang sama. (Ayatullah Khamenei 2019).

Islam sangat melindungi hak asasi manusia. Bahkan, konsep HAM Islam berupa bangunan yang solid dan filosofis. Ayatullah Khamenei menyatakan bahwa perbedaan HAM Islam dengan HAM gaya Barat berakar dari perbedaan “pandangan dunia” dari kedua pihak. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang dalam proses penciptaannya dibekali dengan sifat-sifat dasar yang baik berupa kemuliaan, kebaikan, dan kesadaran akan adanya tujuan hidup, dan itu semua tidak terbatas kepada hal-hal yang sifatnya materialis-empiris. Dalam pandangan Islam, setiap manusia memiliki hak asasi yang bersifat komprehensif, yang meliputi hak-hak material dan spiritual. Konsep ini sangat berbeda dengan Barat karena mereka tidak pernah mengakui adanya nilai dan hakikat di balik hal-hal yang empirik ini, sehingga konsep HAM mereka tidak menjangkau hakikat spiritual tersebut (<https://www.noormags.ir>).

Namun, slogan-slogan HAM dan demokrasi yang didengungkan Barat merupakan alat untuk melanggengkan neoimperialisme dengan cara modern. Jika dulu di masa imperialisme, Barat mengeruk kekayaan alam di negeri jajahan dengan perampasan secara terang-terangan, di masa neoimperialisme, eksploitasi sumber daya

alam mereka lakukan dengan cara penanaman modal. Misalnya, dengan membangun perkebunan-perkebunan besar yang merusak lingkungan, yang hasilnya lebih banyak dikuasai oleh pemodal, sedangkan rakyat setempat hanya menjadi pekerja dengan upah rendah. Sistem seperti ini bisa berlangsung karena dilindungi oleh undang-undang, sehingga semua seolah legal. Namun, pembuatan undang-undang itu dibiayai oleh pemodal sehingga menguntungkan mereka. Zaenal Arifin Mochtar, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, dalam salah satu pemaparannya, menyebutkan bahwa pihak asing telah mendanai sebagian besar proses pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, seperti UU Migas, UU Ketenagalistrikan, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal. Menurutnya, campur tangan asing itu membuat konstitusi Indonesia menjadi pro-pemodal dan hal ini dilakukan secara sistematis mulai saat proses amandemen hingga ke proses penyusunan perundang-undangan yang lebih rendah (hukumonline.com 2008).

Negara-negara yang berani menantang Barat, disudutkan dengan isu HAM dan demokrasi, diberi sanksi (embargo) ekonomi, dan bahkan akhirnya diperangi secara langsung. William Blum (2013) dalam bukunya, *Demokrasi: Ekspor Amerika yang Paling Mematikan*, mencatat bahwa AS sejak tahun 1945 telah berusaha untuk menggulingkan lebih dari 50 pemerintah asing, yang sebagian besarnya dipilih secara demokratis oleh rakyat negara tersebut. Selain itu, AS juga melakukan intervensi dalam pemilu demokratis setidaknya di 30 negara. AS juga melakukan upaya pembunuhan kepada lebih dari 50 pemimpin asing. AS telah menjatuhkan bom pada rakyat sipil di lebih dari 30 negara.

Di antara negara yang menjadi target penggulingan pemerintah yang menolak tunduk pada AS adalah Indonesia, Iran, dan Suriah. David T. Johnson, seorang mantan diplomat AS, menulis dalam bukunya berjudul *Indonesia 1965: The Role of the US Embassy*, bahwa AS dan CIA terlibat dalam penggulingan Presiden Sukarno

melalui peristiwa G30-S, dengan tujuan agar Sukarno tidak jatuh ke pangkuan komunisme dalam konteks Perang Dingin saat itu (Muarabagdjaja 2002). Menurut Blum (2013), AS mengenyahkan Sukarno karena terganggu oleh pandangan Sukarno yang nasionalistik dan netralistik (dalam konteks Perang Dingin, Sukarno menolak berpihak dan mendirikan Gerakan Non Blok). Sementara itu, Suriah, sejak 2011 menjadi target agenda penggulingan rezim Barat yang memanfaatkan *proxy* organisasi-organisasi teroris transnasional.

Mengenai Iran, Blum menyebut adanya upaya AS dan Israel yang menekan Iran dengan isu HAM. Dalam kejadian terbaru, Iran diserang dengan propaganda yang sangat masif terkait “pelanggaran HAM perempuan”. Atas tuduhan pelanggaran HAM, Iran dikenai berbagai sanksi ekonomi. Dengan alasan nuklir, Iran juga dikenai sanksi ekonomi oleh AS, di mana negara-negara dunia dilarang AS untuk melakukan kerja sama ekonomi, bahkan termasuk mengeksport perlengkapan medis dan obat-obatan ke Iran. Bahkan AS juga melakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran, sabotase peralatan nuklir Iran dengan virus komputer, penjualan suku cadang dan bahan mentah yang rusak, kecelakaan pesawat yang tidak dapat dijelaskan, dan ledakan di fasilitas Iran (Blum 2013).

Blum menulis bahwa AS sebenarnya sama sekali tidak peduli HAM dan demokrasi, terbukti dari banyaknya pemerintahan di berbagai negara yang digulingkan oleh AS, padahal dipilih melalui proses demokratis. AS membawa jargon demokrasi untuk menekan pemerintahan negara-negara; tapi tidak mendorong terjadinya demokrasi ekonomi, yaitu kondisi di mana kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak terjadi lagi. Hal ini senada dengan pernyataan Ayatullah Khamenei mengenai demokrasi ala AS. Dalam pandangan Khamenei, demokrasi gaya AS dan negara-negara Barat adalah sebuah kebohongan dan hipokritas. Khamenei bahkan menyebut demokrasi AS sebagai bentuk penipuan dengan tujuan untuk melestarikan penjajahan mereka atas negara-negara Dunia

Ketiga, termasuk negara-negara muslim. Menurut Khamenei, tujuan mereka dengan mengkampanyekan demokrasi sebenarnya adalah memastikan bahwa para pemimpin negara-negara dunia tersebut memiliki kepatuhan kepada Amerika dan Barat, sehingga segala kebijakannya sesuai dengan agenda imperialisme mereka (<https://www.abtaab.ir>).

CONCLUSION

Masa penjajahan langsung negara-negara Barat terhadap bangsa-bangsa Dunia Ketiga memang telah berakhir. Hampir semua bangsa di dunia ini telah meraih kemerdekaannya, kecuali Palestina. Negara-negara tersebut mampu mengelola sendiri pemerintahan mereka. Namun, pada kenyataannya, penjajahan masih terus berlangsung, melalui penguasaan ekonomi, politik, maupun budaya. Masa ini merupakan periode neoimperialisme. Ayatullah Khamenei telah mengungkapkan aktor utama neoimperialisme, yaitu kekuatan Barat dan elit pribumi yang tunduk kepada Barat. Ia juga mengkritisi jargon-jargon neoimperialis, yaitu modernitas, kemajuan, HAM, dan demokrasi. Menurut Ayatullah Khamenei, Islam sama sekali tidak menentang keempat konsep tersebut, namun menentang penyalahgunaan konsep-konsep itu untuk kepentingan neoimperialisme. Islam menyerukan perlawanan terhadap neoimperialisme

REFERENCES

- Bayat, Asef. 2008. "Islamism and Empire: The Incongruous Nature of Islamist Anti-Imperialism." *Socialist Register* 44.
- Blum, William. 2013. *America's Deadliest Export: Democracy—The Truth about US Foreign Policy and Everything Else*. New York: Zed Books, 2013.
- "Definisi Imperialisme dan Neoimperialisme – Encyclopedia.com. May 26, 2023. <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/neoimperialism>
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Farih, Amin. 2016. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24 (2).
- Irshad, Muhammad. 2020. "British Imperialism: Its Impacts on Muslims and Nationalism in British India." *International Journal of Political Science and Governance* 2 (1).
- Khamenei, Sayid Ali. 2009. "Khutbah Sayyid Ali Khāmena'i: Mustaq'afin." <https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1144>.
- Khamenei, Sayid Ali. 2009. "Khutbah Sayyid Ali Khāmena'i: Mustaq'afin." May, 15. <https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7739>
- Khamenei, Sayid Ali. 2015. "Khutbah Sayyid Ali Khāmena'i." March, 24. <https://www.noormags.ir/view/en/article/page/116940/>.
- Khamenei, Sayid Ali. 2023. "Khutbah Sayyid Ali Khāmena'i." Jan, 2. <https://www.abtaab.ir/1402/01/02/16100/>.
- Muarabagdja, M.H. 2002. "Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S." Accessed June 1, 2023. <https://nasional.tempo.co/>

- read/1640671/menapaki-jejak-keterlibatan-cia-dalam-g30s.
- Rundjan, Rahadian. 2017. "Sukarno, Conefo, dan Perdamaian Dunia." Accessed June 1, 2023. <https://www.dw.com/id/sukarno-conefo-dan-perdamaian-dunia/a-41109304>.
- Sapanti, I.R. 2018. "Ideologi dalam Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno pada KTT Non-Blok di Kairo (Analisis Wacana Kritis)." *Jurnal Konfiks* 5 (2).
- Shirazi, Nasir Makarim. *Tafsir Nemuneh: Tafsir Surah Hūd ayat 61*. <https://www.makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=20956&catid=6509&pid=61877>.
- Shiva, Vandana. 2016. *Who Really Feeds the World? The Failures of Agribusiness and the Promise of Agroecology*. California: North Atlantic Books.
- www.hukumonline.com. 2008. "Memprihatinkan, Proses Legislasi Indonesia Banyak Dibiayai Asing". Accessed June 1, 2023. www.hukumonline.com/berita/a/memprihatinkan-proses-legislasi-indonesia-banyak-dibiayai-asing-hol19864/.